



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Dampak Ekonomi Jepang dan Korea Selatan
Terkait Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*
Akibat Adanya Peningkatan Tensi Politik Pulau
Takeshima/Dokdo**

Skripsi

Oleh:

Claudia Adistis Putri
2013330017

Bandung

2016



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Dampak Ekonomi Jepang dan Korea Selatan
Terkait Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*
Akibat Adanya Peningkatan Tensi Politik Pulau
Takeshima/Dokdo**

Skripsi

Oleh:

Claudia AdistisPutri
2013330017

Pembimbing:

Giandi Kartasmita, S. IP., M. A.

Bandung

2016

Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Claudia Adistis Putri
Nomor Pokok : 2013330017
Judul : Dampak Ekonomi Jepang dan Korea Selatan Terkait
Pemutusan Perjanjian *Currency Swap* Akibat Adanya
Peningkatan Tensi Politik Pulau Takeshima/Dokdo

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Senin, 10 Oktober 2016
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sapta Dwikardana, Ph. D : _____

Sekretaris

Giandi Kartasmita, S. IP., M. A. : _____

Anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Claudia Adistis Putri
NPM : 2013330017
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Penelitian : Dampak Ekonomi Jepang dan Korea Selatan Terkait Pemutusan Perjanjian *Currency Swap* Akibat Adanya Peningkatan Politik Pulau Takeshima/Dokdo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Oktober 2016

Claudia Adistis Putri

ABSTRAK

Nama : Claudia Adistis Putri
NPM : 2013330017
Judul Skripsi : Dampak Ekonomi Jepang dan Korea Selatan Terkait
Pemutusan Perjanjian *Currency Swap* Akibat Adanya Peningkatan Politik Pulau
Takeshima/Dokdo

Perjanjian *currency swap* antara Jepang dan Korea Selatan terjadi di bawah Chiang Mai Initiatives pada tahun 2001. Perjanjian *currency swap* ini diwarnai oleh adanya latar belakang historis di antara keduanya yang seringkali menjadi pemicu peningkatan tensi politik. Pada tahun 2015, perjanjian *currency swap* dibiarkan kadaluwarsa oleh kedua negara sebagai bentuk penolakan atas aktivitas politik yang dilakukan di antara kedua negara terkait sengketa Pulau Takeshima/Dokdo. Hal ini menimbulkan pertanyaan riset peneliti yaitu, “Bagaimana dampak ekonomi Jepang dan Korea Selatan terkait pemutusan perjanjian *currency swap* akibat adanya peningkatan tensi politik?”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan yang dilatarbelakangi oleh aktivitas politik dan menyebabkan adanya pemutusan perjanjian *currency swap*. Untuk menjawab pertanyaan riset, peneliti meneliti dari latar belakang historis keduanya dan perubahan ekonomi yang terjadi sebelum dan setelah adanya perjanjian *currency swap*. Pada akhirnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan teori *hedging*, pemutusan perjanjian *currency swap* akan berdampak signifikan terhadap perekonomian negara, khususnya Jepang yang sedang mengalami stagnasi dalam perekonomian dilihat dari aspek ekspor, impor, investasi, dan nilai mata uang asing antara Jepang dan Korea Selatan.

ABSTRACT

Nama : Claudia Adistis Putri

NPM : 2013330017

Judul Skripsi : *Japan and South Korea Economic Impact in Regards of Currency Swap Cut-Off Caused by Takeshima/Dokdo Political Tension Escalation*

Currency swap agreement between Japan and South Korea occurred under the Chiang Mai Initiatives in 2001. Currency swap agreement between two countries was influenced by historical background that often triggered a political tension escalation. In 2015, currency swap agreement was left expired by two countries as a refusal action towards political activities that related to Takeshima/Dokdo Island dispute. Thus, it caused a research question regarding, “How is the impacts towards Japan and South Korea economics in regards of currency swap agreement cut-off that caused by political tension escalation?”

The objection of this research is to observe impacts towards Japan and South Korea economics that was influenced by political activities and caused a currency swap agreement cut-off between two countries. In order to answer the research question, researcher do a research regarding the two countries’ historical background and the changes in economics that occurred before and after the currency swap agreement cut-off. As a conclusion, researcher can conclude that refer to hedging theory, currency swap cut-off will give a significance economic implication, especially Japan that already experienced economic stagnation lately that could be seen from export and import level, investment level, and the exchange rates.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga karya ilmiah dapat selesai tepat dengan waktunya. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Ekonomi Jepang dan Korea Selatan Terkait Pemutusan Perjanjian *Currency Swap* Akibat Adanya Peningkatan Tensi Politik Pulau Takeshima/Dokdo”. Adapun penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang memberikan motivasi dan dukungan baik secara moral maupun materiil. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Mas Giandi selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat kepada penulis. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan selama satu semester dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengaharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bandung, 3 Oktober 2016

Claudia Adistis Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan malaikat-malaikat Nya yang telah memberikan kekuatan, karunia, dan berkat yang melimpah dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala karunia yang masih diberikan atas diri yang tidak sempurna ini. He shall increase, I shall decrease. Everyday I fail you, yet your mercy remains! Thank you God!

Terima kasih kepada mam, pap, dan dede Clara yang senantiasa menguntai doa setiap harinya. Tidak lelah memberikan dukungan baik moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kelak cepat membahagiakan kalian. Amin.

Terima kasih kepada Mas Giandi! Mas Giandi tetap pertama aku bercanda. Terima kasih atas telinga yang terus menerus mau mendengarkan cerita gossip dan patah hati dan jatuh hati di sela-sela buat bab bab dan revisi revisi. Terima kasih kepada Mas Pur yang kalau bukan karena beliau saya mungkin tidak akan bisa skripsi dan lulus di semester 9 mungkin. Terima kasih!

Terima kasih untuk dosen-dosen FISIP dan HI yang memberikan ilmu selama 3 tahun lebih ini semoga dapat diaplikasikan di masa depan nanti. Mba Diandra, raja ROP dan BOD Prakdipku, Ko Abe, Bang Tian, Mas Irawan, Mas Apres, Mba Ratih, dan semua!

Terima kasih Bidadari UNPAR! Terima kasih atas kenangan selama 3 tahun ini. Tanpa kalian aku tidak akan survive uni. Terima kasih Meylina atas up and down yang dilalui bersama. Lets go together to the top! Untuk Jeje yang tidak-mau-dengerin-nasehat kind of friendship relationship! My twinnie! Buat Meri my roommate yang sebenarnya tidak pernah bobo bareng di 306. Terima Kasih Tif! Atas kekonyolan dan keawkwardan yang terjadi. Semoga semakin dekat dengan Tuhan! Makasi bu wakil presiden Sardubs, semoga semakin keren fashionnya wk. Buat Kania yang selalu mengisi dengan drama awkarin dan kekonyolannya dan cerita

bokep. Terima kasih buat Ecing yang selalu hadir dengan cerita absurd dan curhatan ga jelas. Terima kasih buat Diding! Semoga semakin ada yang mau raba. Terima kasih buat Idiii! Yang mengajarkan aku pengetahuan tentang Chicken Fiesta. Like I am gonna miss you guys. A. Lot. Kapan lagi kita belajar yang berujung sleepover setiap UTS dan UAS? Kapan lagi gossip ngomongin orang? Kapan lagi Bidun bikin isu yang bikin UNPAR gempar? Cuman bidun yang bisa. I love you guys.

Terima kasih untuk Livia Saputra yang walaupun jauh we always have that kind of relationship yang semangat each other. I am going to love you till forever.

Terima kasih geng personil MPM FISIP JAYA, Jediza, Ka Yaya yang sudah seperti sibling selama kurang lebih 1 tahun ini dan selamanya, terima kasih atas setiap telinga, pundak, dan ATM berjalan buat Adis. I love you!

Terima kasih untuk teman-teman geng gabut yang ada di saat patah hati jatuh hati lalu beneran jatuh terus tak bisa bangkit lagi, Ka Yodi, Ko Eric, Mikey. See you soon.

Terima kasih untuk HI UNPAR 2013 dan juga FISIP 2013! Anak ini cinta mati FISIP UNPAR. Maaf kalo buat isu dan maaf kalo semasa wakilin kalian di MPM banyak kurangnya.

Terima kasih MPM 2015/2016! Organisasi yang jadi keluarga baru. 20 orang hebat yang selalu memberi insight, lelucon, hinaan yang entah membangun atau bukan, I already miss you guys! Ayo Diklat hehe.

Terima kasih teman-teman yang pernah menemani selama tiga tahun kuliah di UNPAR! Teman yang menemani BAB 1 dan teman yang menemani pembuatan bab 2. Good things that end too fast. Yet it leave the depth. He. Buat Tamsip Girls (Karin, Katya, Ijop, Vena), David, Stella, Derian, ROP Prakdip 2015/2016, Chinese Chair 2015/2016, FISIP SQUAD ALL STAR 2015/2016, PM UNPAR 2015/2016, LKM BANGGA 2015/2016, MPM FISIP 2016/2017, BURT 2016/2017. I am going to miss all of you! Geng-geng UNPAR AMBASS 2016/2017, juga teman-teman lain yang telah membantu proses adis berkembang selama di Unpar. Semoga doa dan bentuk dukungan selalu menjadi berkat kebalikan buat kalian semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GRAFIK	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.2.1 Deskripsi Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah	14
1.2.3 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian	15
1.4 Kajian Literatur	15
1.5 Kerangka Pemikiran	18
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	28
1.6.1 Metode Penelitian	28
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	28

1.7 Sistematika Pembahasan	29
BAB II CHIANG MAI INITIATIVES SEBAGAI LANDASAN <i>CURRENCY SWAP</i> ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN	
2.1 Chiang Mai Initiatives sebagai Upaya Kerjasama Finansial Regional	31
2.1.1 Latar Belakang dan Mekanisme Perjanjian <i>Currency Swap</i> dalam Chiang Mai Initiatives	31
2.1.2 Perjanjian Bilateral <i>Currency Swap</i> yang Terjadi di Bawah Chiang Mai Initiatives	38
2.2 <i>Bilateral Swap Agreements</i> (BSAs) yang Dilakukan Antara Jepang dan Korea Selatan	43
2.2.1 Pengaruh <i>Bilateral Swap Agreements</i> (BSAs) terhadap Perekonomian	43
2.2.2 Perjanjian <i>Currency Swap</i> Jepang dan Korea Selatan	46
BAB III PEMUTUSAN PERJANJIAN <i>CURRENCY SWAP</i> JEPANG DAN KOREA SELATAN SEIRING DENGAN MENINGKATNYA TENSI POLITIK TERKAIT PULAU TAKESHIMA/DOKDO	
3.1 Latar Belakang Hubungan Politik Jepang dan Korea Selatan	50
3.1.1 Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan.....	50
3.1.2 Latar Belakang Historis Jepang dan Korea Selatan yang Mempengaruhi Aktivitas Politik	57

3.2 Pemutusan Perjanjian Currency Swap Jepang dan Korea Selatan63

3.2.1 Pemutusan Perjanjian *Currency Swap* yang Dipengaruhi oleh Peningkatan Tensi Politik antara Jepang dan Korea Selatan63

3.2.2 Upaya Pemerintah Jepang dan Korea Selatan Paska Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*67

BAB IV IMPLIKASI EKONOMI JEPANG DAN KOREA SELATAN

SETELAH PEMUTUSAN PERJANJIAN *CURRENCY SWAP*

4.1 Implikasi Ekonomi yang Disebabkan oleh Adanya Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*69

4.2 Perekonomian Jepang dan Korea Selatan Sebelum Adanya Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*71

4.2.1 Kondisi Ekonomi Jepang Sebelum Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*71

4.2.2 Kondisi Ekonomi Korea Selatan Sebelum Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*74

4.2.3 Relasi Ekonomi Jepang dan Korea Selatan Sebelum Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*76

4.3 Perubahan Ekonomi Jepang dan Korea Selatan Setelah Adanya Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*82

4.3.1 Kondisi Ekonomi Jepang Setelah Pemutusan Perjanjian *Currency Swap*.....82

4.3.2 Kondisi Ekonomi Korea Selatan Setelah Pemutusan Perjanjian <i>Currency Swap</i>	84
4.3.3 Relasi Ekonomi Jepang dan Korea Selatan Setelah Pemutusan Perjanjian <i>Currency Swap</i>	86
4.4 Epilog	89
BAB V KESIMPULAN	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 :	1
Gambar 3.2 :	4
Gambar 3.3 :	4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 :	1
Grafik 2.2 :	4
Grafik 2.3 :	4
Grafik 3.1 :	1
Grafik 3.2 :	4
Grafik 3.3 :	4

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 :	1
Tabel 3.2 :	4
Tabel 3.3 :	4

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam bab 1 ini, Penulis akan membahas mengenai latar belakang dari masalah pemutusan perjanjian *currency swap*, kerangka pemikiran yang Penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, kajian literatur yang digunakan sebagai karya pembanding terkait dengan bahasan Penulis, juga terkait metode dan sistematika pembahasan skripsi Penulis.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara tidak langsung dapat mempengaruhi percepatan ekonomi dunia. Globalisasi mempengaruhi kecepatan perputaran barang dan jasa, aliran modal dan aliran tenaga kerja. Dalam konteks perdagangan, globalisasi membuat suatu negara menjadi saling bergantung dengan negara lainnya. Di era globalisasi, seluruh sektor perdagangan menjadi sangat bebas. Batas negara tidak lagi menjadi suatu penghalang untuk melakukan perdagangan. Sektor perdagangan yang termasuk tidak terhingga, dari mulai perdagangan barang dan jasa hingga perdagangan tenaga kerja. Berbagai perjanjian secara bilateral, multilateral, regional maupun internasional dilakukan untuk menunjang perdagangan bebas di era globalisasi ini.

Meskipun batas negara kini sudah menjadi samar di dalam konteks perdagangan, negara tetap menjadi aktor utama sebagai pemegang otoritas tertinggi. Negara memegang peran penting dalam menentukan kebijakan di setiap negara, salah satunya adalah kebijakan ekonomi. Setiap kebijakan yang diambil pun harus seiring dengan politik dan strategi luar negeri suatu negara. Secara tidak langsung, setiap kebijakan yang ditentukan mempengaruhi sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional adalah salah satu yang dijunjung tinggi oleh sebuah negara.¹ Menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations*, “*The statesman must think in terms of national interest, conceived as power among other powers*”. Kepentingan nasional yang dimaksud dapat berupa kepentingan bersifat politik, sosial, maupun ekonomi. Kepentingan nasional ini yang menentukan langkah suatu negara dan diformulasikan menjadi sebuah politik luar negeri. Politik luar negeri inilah yang menjadi instrumen sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kepentingan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat menentukan identitas suatu negara.² Namun, di atas kepentingan ekonomi, negara memiliki kepentingan nasional lain yang dianggap vital dan dapat mendukung kekuatan

¹ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, (New York: Alfred A. Knopf, 1978), hal 4-15

² Donald E. Nuechterlein, *America Recommitted: A Superpower Assesses its Role in a Turbulent World*, (Kentucky: University Press of Kentucky, 2000)

suatu negara. Yang pertama adalah kepentingan geografi, salah satu yang menentukan kestabilan negara adalah geografi. Kepentingan geografi sering dikaitkan dengan kekuatan negara secara teritorial. Kepentingan geografi dapat menjadi aset untuk menentukan posisi internasional sebuah negara. Sebagai contoh, teritorial Amerika Serikat yang memiliki luas hampir 3000 kilometer ke sebelah timur dan lebih dari 6000 kilometer ke sebelah barat. Hal itu yang menjadi faktor pendukung Amerika Serikat untuk menentukan posisinya di dunia.³

Yang kedua adalah kepentingan akan kepemilikan bahan mentah. Kepemilikan bahan mentah atau sumber daya alam akan menentukan kekuatan suatu negara. Selain sumber daya alam itu dapat digunakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, sumber daya alam dapat menentukan pengaruh sebuah negara dalam konstelasi internasional. Negara-negara Timur Tengah memiliki kekuatan dalam bidang minyak dan energi dan hal itu yang menyebabkan negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis menjalin “diplomasi minyak” dengan negara-negara Timur Tengah.⁴

Hal di atas menunjukkan bahwa dalam menentukan setiap kebijakan, negara akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan lain yang dianggap

³Morgenthau, Op.cit, hal 112-128

⁴ Ibid.

vital oleh sebuah negara. Kepentingan tersebut yang menjadi dasar atas pembentukan suatu kebijakan luar negeri.

Tidak dapat dipungkiri di era kontemporer ini, satu negara dengan negara lain tidak dapat melepaskan diri dan saling bergantung satu sama lain. Satu negara saling bergantung dengan negara lain dalam berbagai cara dan dalam berbagai level. Interdependen tidak terlepas dari elemen-elemen seperti ketegangan, keterbatasan yang sering menyebabkan konflik kepentingan, perbedaan pandangan dan juga sistem nilai di dalam Politik Ekonomi Internasional.⁵

Semenjak Perang Dunia II, interdependen negara semakin meningkat. Interdependen yang sering terjadi adalah interdependen secara ekonomi. Hubungan ekonomi yang semakin erat ini menghilangkan batas antar negara dan posisi negara sebagai aktor sentral semakin dipertanyakan.⁶

Di era globalisasi ini, konflik kerap kali terjadi di antara negara-negara maju yang memiliki banyak kepentingan seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai contoh, Amerika Serikat banyak melakukan kebijakan proteksionisme terhadap barang yang berasal dari Tiongkok. Hal ini dilakukan karena Amerika

⁵Balaam, David N., Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, (New Jersey: East End Publishing Services, 2001)

⁶C. Roe Goddard, dkk., *International Political Economy 2nd edition: State-Market in a Changing Global Order*, (Palgrave McMillan, 2003)

Serikat dan Tiongkok sedang berlomba untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi paling besar.

Robert Keohane mengatakan bahwa⁷:

“Di dalam perekonomian dunia, kapan pun juga, para pelakunya menggunakan kekuasaan (*power*) untuk saling memberikan pengaruh satu sama lain agar dapat mencapai tujuan masing-masing. Hal inilah yang membuat ekonomi internasional sarat dengan muatan politik”⁸

Sistem ekonomi internasional tidak dapat terlepas dari pengaruh politik.

Politik ini dapat dilihat dari pelaku ekonomi yang dapat melakukan kekerasan atau pemaksaan demi mencapai kepentingan negaranya. Sebagai contoh, di dalam konteks perdagangan bebas di mana berbagai perjanjian dilakukan untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi berbagai negara. Meskipun berbagai negara sudah setuju dan meratifikasi berbagai perjanjian perdagangan bebas, kepentingan nasional negara adalah variabel paling penting. Berbagai hambatan perdagangan diberlakukan, dari mulai hambatan perdagangan yang bersifat *tariff* maupun *non-tariff*. Hambatan perdagangan tersebut diberlakukan untuk memproteksi ekonomi domestik.

Di dalam perdagangan internasional, tentu negara tidak bisa menghindari tendensi munculnya ketegangan. Tensi politik atau ketegangan politik adalah

⁷ Robert O. Keohane, *After Hegemony*, (Princeton: Princeton University Press, 1984), hal. 21

⁸“Hambatan perdagangan *tariff* dapat berupa pemberlakuan pajak atau bea cukai, sedangkan hambatan *non-tariff* dapat berupa pembatasan kuota atau regulasi yang berkaitan dengan komoditas barang yang diperdagangkan. Regulasi yang dimaksud terkait berbagai kebijakan dan aturan perdagangan yang diterapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi”

Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal 67-68

sesuatu yang tidak dapat dihindari karena secara tidak langsung politik dan ekonomi akan selalu saling berinteraksi. Objektif ekonomi, sumber daya ekonomi, dan instrumen ekonomi adalah hal yang akan selalu menjadi tujuan dari seorang aktor politik. Sering kali, kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai sarana untuk menghindari kontrol politik, untuk melakukan integrasi antar masyarakat dan juga digunakan pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional dan kekuatan negara.⁹ Robert Gilpin mengutip pernyataan Heilbroner dalam bukunya, *The Political Economy of International Relations* bahwa:

*“The logic of the market is to locate economic activities where they are most productive and profitable; the logic of state is to capture the control the process of economic growth and capital accumulation”*¹⁰

Politik dan ekonomi tidak akan bisa dipisahkan karena variabel tersebut adalah instrumen yang digunakan oleh suatu negara dalam memproduksi kekuatan dan kekayaannya. Oleh sebab itu, sebuah perilaku politik dapat menyebabkan perubahan situasi ekonomi dan kebijakan ekonomi dapat pula menyebabkan dinamika politik.

Banyak situasi politik yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi, salah satunya adalah situasi politik yang mewarnai hubungan ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan memiliki latar belakang historis yang kelam. Pada era imperialisme, Jepang banyak melakukan kejahatan perang

⁹ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (Princeton University Press, 1987), hal 11

¹⁰ Ibid.

di Korea Selatan. Hal itu menyebabkan hubungan politik di antara Jepang dan Korea Selatan sering kali dalam situasi yang tidak baik.

Seperti halnya ketika Perdana Menteri Abe yang mendatangi kuil Yasukuni, di mana di kuil tersebut banyak dimakamkan orang Jepang yang dianggap sebagai para penjahat perang di masa imperialisme Jepang di Asia. Tindakan ini melukai hati warga Korea Selatan. Perbedaan pendapat mengenai kejahatan perang yang dilakukan Jepang dan tidak adanya inisiasi baik untuk melakukan ganti rugi semasa perang membuat Jepang mendapat pandangan negatif dari Korea Selatan.¹¹

Pada tahun 2012, konflik teritorial mengenai kepemilikan dari Pulau Dokdo (pemberian nama dari Korea Selatan) atau Pulau Takeshima (pemberian nama dari Jepang) kembali muncul ke permukaan. Hal ini dipicu oleh kedatangan Lee Myung-Bak, Presiden Korea Selatan saat itu, ke Pulau Dokdo yang pada akhirnya menimbulkan kemarahan warga Jepang.¹²

Situasi politik ini menyebabkan Jepang dan Korea Selatan memutuskan untuk memberhentikan perjanjian bilateral dalam bidang keamanan terkait kerja sama badan intelijen negara¹³ dan juga memberhentikan perjanjian bilateral

¹¹Jonathan Soble, "Shinzo Abe Stays Away as Japanese Lawmakers Visit Contentious Yasukuni Shrine", *The New York Times*, 20 Oktober 2015, diakses pada 1 Maret 2016, http://www.nytimes.com/2015/10/21/world/asia/japan-yasukuni-shrine-shinzo-abe.html?_r=0

¹²"South Korea's Lee Myung-Bak visits disputed islands", *BBC*, 10 Agustus 2012, diakses pada 1 Maret 2016, <http://www.bbc.com/news/world-asia-19204852>

¹³"South Korea postpones historic military pact", *BBC*, 29 Juni 2012, diakses pada 1 Maret 2016 <http://www.bbc.com/news/world-asia-18640476>

dalam bidang ekonomi yaitu pertukaran valuta asing sebesar 57 miliar dolar AS.¹⁴

Hal ini yang kemudian mendasari Penulis untuk melakukan penelitian mengenai: **DAMPAK EKONOMI JEPANG DAN KOREA SELATAN TERKAIT PEMUTUSAN PERJANJIAN *CURRENCY SWAP* AKIBAT ADANYA PENINGKATAN TENSI POLITIK PULAU TAKESHIMA/DOKDO**

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Hubungan ekonomi di Asia Timur semakin meningkat diiringi dengan perjanjian secara regional yang dibentuk oleh negara-negara Asia Timur seperti *East Asia Free Trade Area (EAFTA(ASEAN+3))* dan *East Asian Economic Caucus (EAEC)*. Interdependen ekonomi di kawasan Asia Timur mengalami banyak fluktuasi. Hal ini dilatarbelakangi juga oleh perspektif historis yang masih melekat di antara negara-negara Asia Timur. Secara tidak langsung,

¹⁴ Kyodo, "South Korea let more currency swaps expire", *Japan Times*, 25 Juni 2013, diakses pada 1 Maret 2016 <http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/25/business/japan-south-korea-let-more-currency-swaps-expire/#.VtXCqVLdVdh>

pertumbuhan hubungan sosial dan politik mempengaruhi intensitas pertumbuhan ekonomi di antara negara Asia Timur, khususnya Korea Selatan dan Jepang.¹⁵

Semenjak abad ke-21 awal, ekonomi Korea Selatan mulai meningkat seiring dengan meningkatnya globalisasi. Korea Selatan tidak hanya memfokuskan diri pada perdagangan domestik saja, namun juga pada perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan besar mulai melakukan akselerasi pasar dengan meningkatkan produktivitas ekspor dan juga memperluas jaringan perdagangan dengan terlibat dalam pasar bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA).¹⁶

Jepang adalah salah satu negara di Asia Timur yang memiliki ketahanan ekonomi cukup kuat. Meskipun mengalami penurunan dalam hal *Gross Domestic Product* pada tahun 2007 pada masa krisis ekonomi, Jepang mampu bangkit lagi dan menyentuh angka 5954.48 pada tahun 2012. Kekuatan ekonomi Jepang berasal dari sektor agrikultur, konstruksi, manufaktur dan teknologi.

Semenjak Perang Dunia II berakhir, hubungan ekonomi di antara Korea Selatan dan Jepang semakin meningkat ditandai dengan berbagai perjanjian seperti *Agreement Between Japan and the Republic of Korea Concerning the*

¹⁵Peter A Petri, "Is East Asia Becoming More Independent", *Prepared for the Session on European and Asian Integration: Trade and Monetary Issues American Economic Association and American Committee on Asian Economic Studies*, 2005, diakses pada 1 Maret 2016, <http://www.frbsf.org/economic-research/files/Petri.pdf>

¹⁶Ibid.

Settlement of Problems in Regard to Property and Claims and Economic Cooperation (1965), Japan and Republic of Korea Free Trade Agreement (2003), Japan and Republic of Korea Economic Partnership Agreement (2008).

17

Korea Selatan telah menjadi pasar bagi Jepang dalam hal ekspor. Semenjak tahun 2000 sampai pada angka 8.1%. Sementara itu, ekspor barang Korea Selatan ke Jepang hanya mencapai 4.9% pada tahun 2010. Hal ini membuat neraca perdagangan Korea Selatan ke Jepang mengalami defisit dan menurunkan intensitas hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang.¹⁸

Sebelum tahun 2000, hubungan sosial dan politik tidak banyak mempengaruhi hubungan ekonomi. Seiring dengan adanya era globalisasi, ekonomi Korea Selatan terus meningkat dan Korea Selatan semakin mengurangi ketergantungannya kepada Jepang. Sedangkan, pada tahun 2000 sendiri, Jepang mulai mengalami stagnasi dalam bidang perekonomian. Nilai mata uang Jepang, *yen*, juga terus mengalami depresiasi sedangkan nilai mata uang Korea Selatan yakni *won* terus mengalami apresiasi.

¹⁷Japan-Republic of Korea Economic Partnership Agreement, *Ministry of Foreign Affairs Japan*, diakses pada 1 Maret 2016, www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/rok.html

¹⁸Hidehiko Mukoyama, Japan-South Korea Economic Relations Stronger in a Globalized Environment Hidehiko Mukoyama, *Japan Research Institute 2012*, diakses pada 1 Maret 2016, <http://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/english/periodical/rim/2012/43.pdf>

Jepang dan Korea Selatan berbagi nilai dan norma yang sama, yakni Konfusianisme. Secara kebudayaan, Jepang dan Korea Selatan juga memiliki kemiripan dalam hal aksara dan perilaku. Aksara yang digunakan oleh Jepang adalah huruf *Kanji* dan yang digunakan oleh Korea Selatan adalah huruf *Hanja*. Dalam hal berperilaku, Jepang dan Korea Selatan juga berbagi pemahaman yang sama yaitu seperti penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau tata cara makan. Dalam hal ekonomi, Jepang dan Korea Selatan adalah negara di Asia Timur yang sama-sama bangkit dari keterpurukan ekonomi setelah perang dingin dan melesat menjadi *New Industrialized Countries* (NICs). Namun, terdapat banyak kesalahpahaman dan ketegangan yang terjadi di masa lalu dan secara tidak langsung mengganggu hubungan antara Jepang dan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki pula kedekatan secara geografis.

Penurunan intensitas hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang ini tidak lepas dari latar belakang historis yang dimiliki oleh kedua negara. Invasi Jepang ke Korea Selatan dimulai pada tahun 1952 dan berakhir pada tahun 1958.¹⁹ Invasi ini diwarnai oleh perang bersenjata yang memakan banyak korban jiwa. Perang bersenjata ini dinamai “Perang Imjin” dan perang ini menjadi luka yang dalam bagi warga Korea Selatan sampai saat ini karena perang tersebut

¹⁹Ibid.

membuat negara Korea Selatan menjadi porak-poranda dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.²⁰

Warga Jepang sendiri memiliki sentimen terhadap warga Korea Selatan sehingga sering kali terdapat *hate speech* yang disebarkan untuk menanamkan kebencian terhadap Korea Selatan dalam aksi *Kenkaryu* (anti-gelombang Korea). Dalam *Kenkaryu*, Warga Jepang terus menunjukkan reaksi negatif terhadap perkembangan industri hiburan Korea Selatan. Warga Korea Selatan sendiri melakukan hal yang sama dengan menyuarakan “anti-Jepang”.²¹ Warga Korea Selatan tidak segan-segan untuk mengucilkan masyarakat yang pro-Jepang atau merupakan turunan prajurit pro-Jepang. Aktivitas masyarakat ini yang juga mendorong hubungan Jepang dan Korea Selatan ke arah yang lebih buruk. Warga Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki prasangka buruk satu sama lain dan tidak ada yang memiliki inisiatif untuk memperbaiki hubungan tersebut.

Pada tahun 2011, Pengadilan Konstitusi Korea Selatan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan militer yang dilakukan oleh Jepang, terutama terkait “*comfort women*”.²² Namun, Jepang dan Korea Selatan tidak berhasil melakukan negosiasi tentang isu ini. Pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan,

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² *Comfort Women* adalah istilah untuk perempuan yang mengalami kejahatan dan perbudakan seksual pada masa perang. Moteki Hiromichi, The truth about the "comfort women", diakses pada 7 Maret 2016, http://www.sdh-fact.com/CL02_1/84_S4/pdf

Lee Myung-bak, mengunjungi Pulau sengketa yakni Pulau Takeshima/Dokdo dan hal ini yang mengundang kemarahan dari pemerintah Jepang.

Hal ini berujung pada keinginan Jepang untuk memutuskan perjanjian bilateral terkait pertukaran valuta asing (*currency swap*) dengan Korea Selatan pada tahun 2012. Perjanjian bilateral ini dilakukan sejak tahun 2001 di bawah perjanjian multilateral *Chiang Mai Initiatives*. Jepang setuju untuk menyediakan 10 miliar US\$ kepada Korea Selatan dan meningkat menjadi 70 miliar US\$ di tahun 2011.²³

Namun, semenjak isu konflik teritorial Pulau Dokdo/Takeshima kembali naik pada tahun 2012, hubungan Jepang dan Korea Selatan semakin memburuk dan dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah *currency swap* dari 54 miliar US\$ menjadi 13 miliar US\$. Pada akhirnya, Jepang memutuskan untuk membiarkan perjanjian ini menjadi kaaluwarsa sebagai bentuk sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan pada tahun 2015.

Dari masalah di atas, Penulis dapat melihat bahwa ada kausalitas antara politik dan ekonomi dalam hubungan internasional. Politik dan ekonomi adalah variabel yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks perdagangan internasional karena keduanya baik secara langsung atau tidak langsung akan selalu berinteraksi.

²³Hidehiko Mukayama, Loc.cit

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah penelitian yang dimulai pada tahun 2001 sampai tahun 2015. Hal ini dikarenakan perjanjian *currency swap* antara aktor negara yakni Jepang dan Korea Selatan dimulai pada tahun 2001 setelah ada kerja sama regional ASEAN+3 yakni Chiang Mai Initiatives dan pemutusan perjanjian *currency swap* di antara keduanya berakhir pada tahun 2015 akibat adanya tensi politik yang mulai meningkat semenjak tahun 2012 sampai tahun 2015. Penelitian Penulis juga akan membatasi pembahasan masalah hanya pada aspek ekonomi dan politik di antara kedua aktor saja (Jepang dan Korea Selatan). Dampak ekonomi yang akan dianalisa di dalam penelitian ini adalah pendapatan nasional negara, ekspor dan impor Jepang dan Korea Selatan, tingkat investasi, dan juga perubahan nilai mata uang asing.

1.2.3 Rumusan Masalah

Bagaimana dampak dari adanya pemutusan perjanjian currency swap akibat adanya peningkatan tensi politik terhadap perekonomian Jepang dan Korea Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara situasi politik terhadap kebijakan ekonomi, dalam kasus pemutusan perjanjian *currency swap* oleh Jepang dan Korea Selatan yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan politik. Ketegangan politik ini didorong oleh adanya konflik teritorial atas Pulau Dokdo/Pulau Takeshima. Selain itu, Penulis juga ingin melihat faktor historis dalam melihat relasi antara Jepang dan Korea Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang ingin melakukan pengkajian terhadap hubungan antara perilaku politik dan perilaku ekonomi. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif terhadap hubungan antara situasi politik dan ekonomi, terutama untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang ingin mencari pemahaman mengenai Ekonomi Politik Internasional.

1.4 Kajian Literatur

Jurnal Jared Pizza, *The Significance and Importance of the Dokdo Island to South Korea and Japan*, North Shore Community College²⁴

²⁴ Jared Pizza, *The Significance and Importance of the Dokdo Island to South Korea and Japan*, North Shore Community College, diakses pada 20 Agustus 2016, <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/The-Significance-and-Importance-of-the-Dokdo-Island-to-South-Korea-and-Japan.pdf>

Di dalam jurnal ini, Jared Pizza menjelaskan bagaimana Korea Selatan dan Jepang memiliki ketegangan politik satu sama lain yang disebabkan oleh sengketa terhadap Pulau Dokdo/Takeshima ini. Jared Pizza menjelaskan bagaimana awal mula dari sengketa tersebut, di mana sengketa tersebut berawal dari penjajahan yang dilakukan Jepang ke Korea Selatan. Selama masa penjajahan tersebut, Jepang menggunakan kekuasaannya dan kelemahan Korea Selatan di dalam bidang politik untuk mengambil alih beberapa wilayah teritorial Korea Selatan. Di dalam jurnal ini, Jared Pizza hanya menjelaskan bagaimana akhirnya ketegangan politik dan latar belakang historis mempengaruhi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Namun, di dalam jurnal ini belum menjelaskan bagaimana akhirnya ketegangan politik memberi dampak terhadap relasi ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan. Oleh sebab itu, Penulis ingin memberikan penjelasan bagaimana akhirnya latar belakang historis Jepang dan Korea Selatan mempengaruhi hubungan ekonomi dan politik keduanya.

Jurnal Sean Fern, *Tokdo or Takeshima? The International Law of Territorial Acquisition in the Japan Korea-Island Dispute*²⁵

Di dalam jurnal ini, Sean Fern secara lebih mendalam menceritakan proses sengketa, dengan memberikan fakta-fakta di balik awal mula terjadinya sengketa, dan menambahkan fakta baru bahwa lokasi Pulau Dokdo/Takeshima ini memiliki

²⁵ Sean Fern, *Tokdo or Takeshima? The International Law of Territorial Acquisition in the Japan Korea-Island Dispute*, dipublikasikan pada 20 April 2005, diakses pada 20 Agustus 2016, <http://www.dokdo-takeshima.com/wordpress/wp-content/images/Sean-Fern-Dokdo.pdf>

nilai ekonomi yang sangat bagus dalam hal perikanan, sehingga dianggap sebagai salah satu pemicu pula bagi kedua belah pihak yakni Jepang dan Korea Selatan untuk memiliki hak atas Pulau Dokdo/Takeshima.

Di dalam jurnal ini, sudah sedikit memberikan gambaran mengenai adanya nilai ekonomi di dalam sengketa Pulau Dokdo/Takeshima, tetapi belum menjelaskan bahwa ada dampak ekonomi yang disebabkan oleh ketegangan politik antara Jepang dan Korea Selatan, yaitu pemutusan perjanjian pertukaran valuta asing antara kedua negara. Oleh sebab itu, Penulis mencoba menghubungkan dampak ekonomi yang didapat Jepang dan Korea Selatan ketika pemutusan perjanjian currency swap terjadi.

Jurnal Hidehiko Mukayama, *The Impact of a Shaky Japan-South Korea Relationship on Economic Relations – What Should Japan dan South Korea Do Now?*, 2014²⁶

Di dalam jurnal ini, Hidehiko Mukayama membahas mengenai adanya hubungan antara penurunan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan terhadap relasi ekonomi Jepang dan Korea. Di dalam jurnal ini, Hidehiko Mukayama menjelaskan bahwa adanya latar belakang historis di antara kedua negara yang sering kali menjadi hambatan dalam menjalin hubungan ekonomi.

²⁶ Hidehiko Mukayama, *The Impact of a Shaky Japan-South Korea Relationship on Economic Relations – What Should Japan dan South Korea Do Now?*, The Japan Institute, diakses pada 21 Agustus 2016, <https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/english/periodical/rim/2014/51.pdf>

Namun, di dalam jurnal ini, Hidehiko Mukayama belum membahas mengenai dampak ekonomi dari penurunan hubungan politik yang terkait dengan sengketa Pulau Takeshima/Dokdo. Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo sudah sempat dibahas di dalam jurnal ini, namun jurnal ini belum membahas mengenai dampak ekonomi yang disebabkan ketika perjanjian *currency swap* terjadi pada awal tahun 2015.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Hans J. Morgenthau, politik pada intinya adalah tentang penguasaan *power* (kekuatan). Semua yang berkaitan dengan perilaku politik, *power* adalah tujuan utamanya. Jika berbicara tentang politik, politik tidak lepas dari kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang ia inginkan.²⁷ Politik tidak pernah jauh dari kata “persaingan” dan “kerja sama”. Pada dasarnya, politik dijadikan instrumen untuk mencapai kekuasaan dan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya.²⁸

Kekuatan nasional sering dikaitkan dengan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah instrumen bagi suatu negara untuk dapat mencapai apa yang

²⁷ Morgenthau, Loc.cit.

²⁸ Sufri Yusuf, S.H Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian tentang Pelaksanaannya 1989 c.v muliasari hal 89

menjadi tujuan utamanya. Politik luar negeri ini diformulasikan dalam bentuk kebijakan atau regulasi mengenai suatu hal.²⁹

Suatu negara melakukan perjanjian atau kesepakatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk memenuhi keuntungan dan kekayaan diri sendiri. Adam Smith sendiri mengatakan dalam buku *The Wealth of Nations*, bahwa “*Some treaties of commerce, however, have been supposed advantageous upon principles very different from these..*”.³⁰ Meskipun memiliki perbedaan ideologi dan perspektif, budaya atau situasi ekonomi, suatu negara akan terus meningkatkan relasi ekonomi seiring meningkatnya kepentingan nasional suatu negara.

Ekonomi Politik Internasional terdiri dari tiga variabel yakni: ekonomi, politik dan internasional. Ekonomi membicarakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka sehingga bisa digunakan dan dapat didistribusikan di pasar. Politik menjelaskan bagaimana pengaruh kekuatan suatu negara untuk menentukan kebijakan. Proses penentuan kebijakan dalam konteks politik meliputi proses yang dilakukan secara bilateral, multilateral, regional dan global. Hal-hal yang bersifat internasional meliputi isu-isu yang melewati batas negara dan terdapat relasi yang signifikan terkait negara-negara tersebut.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ International Relations in Political Thought 2002 Cambridge University Press Edited by Chris Brown, Terry Mardis, and Nicholas Rengger

³¹ Balaam, David N, Michael Veseth, Op.Cit., hal 5

Menurut Gilpin, politik dan ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Segala bentuk interaksi dan kegiatan politik mempengaruhi ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini juga memperjelas hubungan antara negara dan pasar.³² Permintaan dan penawaran pasar dilakukan oleh pelaku ekonomi, namun negara memegang peran penting dalam hal melindungi pasar dan juga menetapkan regulasi.

Karl Marx mengatakan bahwa politik luar negeri adalah bagian dari perkembangan sistem kapitalisme dan sebagian merupakan kekuatan-kekuatan ekonomi.³³ Politik dan ekonomi internasional sendiri memiliki berbagai pengertian dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Adam Smith mengatakan bahwa politik ekonomi adalah ilmu mengatur sumber daya yang dimiliki negara untuk mencapai kesejahteraan.³⁴

Marx mengatakan bahwa politik ekonomi adalah kepemilikan produksi yang dipengaruhi oleh proses historis. Politik dan ekonomi sendiri juga sering dilihat sebagai suatu pendekatan dalam melihat suatu kasus. Politik dan ekonomi internasional dapat digunakan sebagai metodologi untuk menganalisis perilaku

³²Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (Princeton: Princeton University Press, 1987), hal 8-14; hal 18-24

³³ Sufri Yusuf, S.H, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*, (Bandung: CV Muliasari, 1989), hal 89

³⁴ Adam Smith, Election timing in majoritarian parliaments, *British Journal of Political Science*, hal 397-418

politik yang berkaitan langsung dengan ekonomi ataupun perilaku ekonomi yang berkaitan dengan situasi politik.³⁵

Politik ekonomi internasional dapat diklasifikasikan menjadi tiga perspektif besar: Liberalisme, Marxisme, dan Merkantilisme. Liberalisme menjelaskan politik ekonomi internasional sebagai kepentingan individu. Liberalisme mengelaborasi bahwa di dalam mempelajari ekonomi ada sistem pasar yang dapat diamati. Marxisme sendiri menjelaskan bahwa dalam ekonomi ada sistem kelas dan sering dikaitkan dengan strukturalisme. Sedangkan Merkantilisme menjelaskan bahwa politik ekonomi internasional adalah suatu kepentingan nasional.³⁶

Menurut Robert Gilpin, tiga konsep politik ekonomi internasional ini menawarkan pendekatan yang berbeda. Disiplin Liberalisme menentang adanya campur tangan pemerintah dan mendukung terciptanya pasar bebas. Sistem pasar yang dibuat adalah untuk efisiensi ekonomi, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia.

Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang dibentuk oleh dua pihak untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. Perjanjian bilateral

³⁵Weingsast, Barry R., Donald A. Wittman, *The Oxford Handbook of Political Science*, Oxford University Press, hal 757

³⁶Balaam, David N., Michael Veseth, *Op.cit.*, hal 8

perdagangan biasanya dilakukan untuk menurunkan tarif, menentukan batas kuota, dan pembahasan mengenai hambatan perdagangan lainnya.³⁷

Pemutusan perjanjian internasional biasanya disebabkan oleh beberapa aspek sebagai berikut³⁸:

1. Sudah tercapainya tujuan perjanjian tersebut;
2. Habisnya masa berlaku;
3. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut;
4. Punahnya salah satu pihak perjanjian atau punahnya objek perjanjian tersebut;
5. Diadakannya perjanjian antara peserta, kemudian perjanjian tersebut di batalkan (amandemen);
6. Dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri;
7. Diakhiri perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran tersebut oleh pihak lain.

³⁷ Bilateral and Regional Trade Agreements, Advocates for International Developments Lawyers Erudicating Poverty, diakses pada 7 Maret 2016 <http://www.a4id.org/sites/default/files/user/Bilateral%20and%20Regional%20Trade%20Agreements.pdf>

³⁸ Vienna Convention on Law Treaties between States and International Organization or Between International Organization, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf, diakses pada 5 November 2016

Peningkatan tensi politik dapat mempengaruhi hubungan ekonomi karena konflik politik mampu menciptakan tensi di dalam hubungan diplomasi dan tekanan ekonomi. Instabilitas politik juga mampu membuat reaksi pasar sehingga perubahan politik dapat berujung pada *market shock*. Tensi politik ini seringkali disebabkan oleh keadaan historis dan opini publik yang ada, sehingga meskipun sudah ada hubungan diplomatis yang dilakukan secara bilateral, hal ini tidak dapat dihindari.³⁹

Menurut Adam Smith, sebuah perdagangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh dua hal. Pertama, perdagangan bebas harus didukung oleh sistem pembayaran yang baik, di mana sistem pembayaran tersebut harus stabil dan tidak fluktuatif. Adam Smith menentang adanya sistem pembayaran dengan emas atau perak karena tidak ketidakefektifan sistem pembayaran tersebut akan mempengaruhi perdagangan bebas. Yang kedua, sistem perdagangan bebas haruslah berdasarkan spesialisasi negara. Spesialisasi negara yang dimaksud adalah setiap negara harus melakukan kegiatan perdagangan berdasarkan *comparative advantages* atau *comparative advantages* yang dimiliki oleh negara tersebut.⁴⁰

³⁹ He, Yinghua, dkk., *The Cost of Political Tension: An Anatomy*, dipublikasikan pada Desember 2014, http://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/by/he/political_tension_dec2014.pdf, diakses pada 9 November 2016

⁴⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, *Op.cit.*, hal 61

Sistem keuangan adalah sistem yang menyangkut institusi, hukum, regulasi dan teknik dalam mengatur stok, sekuritas perdagangan, bunga dan jasa finansial yang diproduksi dan didistribusi ke seluruh dunia. Sistem keuangan adalah salah satu yang penting dalam perekonomian dunia. Sistem keuangan yang baik mempengaruhi kondisi ekonomi global. Peran yang dimainkan oleh suatu sistem keuangan adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka seperti tanah, tenaga kerja, kemampuan manajemen, dan modal.⁴¹

Balance of Payments (BoP) atau neraca perdagangan adalah catatan statistik mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang terjadi di antara dua negara dalam batas kurun waktu tertentu. Transaksi yang dicatat dalam BoP adalah kegiatan ekspor dan impor barang jasa, pendapatan yang diperoleh dari investasi, hutang dan beban luar negeri pemerintah, dan juga aliran modal privat antar negara.

Pada tahun 1994, *Bretton Woods* mengadakan diskusi internasional mengenai sistem moneter internasional. Konferensi yang diadakan di New Hampshire tersebut menghasilkan mekanisme pembayaran internasional yang dikenal sebagai *Bretton Woods System*. *Bretton Woods System* sekarang dikenal dengan *International Monetary Fund* (IMF). Berkaitan dengan pertukaran nilai,

⁴¹ Peter R Rose, *Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in a Global Marketplace*, Seventh edition, (USA: McGraw-Hill, 2000), hal 1-3

IMF membebaskan negara untuk mengatur sendiri kebijakan pertukaran nilai (*exchange rate policy*) di dalam sistem pembayaran internasional.⁴²

Sistem moneter internasional biasanya melibatkan mata uang asing yang nilainya dapat sewaktu-waktu berubah. Adanya perubahan ini dapat mempengaruhi sistem perdagangan internasional antar negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya koordinasi mengenai sistem moneter dalam perdagangan internasional untuk menghindari adanya risiko kerugian materiil dalam perdagangan internasional.⁴³

Pembayaran perdagangan internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui transaksi normal, atau arbitrase. Apabila menggunakan transaksi normal, pihak eksportir dapat langsung membayarkan sejumlah nominal tertentu yang tertera di dalam *Balance of Payment* (BoP). Apabila melalui *hedging*, pihak eksportir dapat melakukan spekulasi mata uang asing di masa yang akan datang, untuk menghindari kecurangan pihak lain dalam melakukan perdagangan internasional. Sedangkan arbitrase adalah kegiatan di mana sejumlah pialang melakukan kegiatan pembelian mata uang asing tertentu dalam waktu tertentu untuk kemudian dijual kembali ketika nilai mata uang

⁴² Ibid, hal 714

⁴³ Bob Sugeng Hadiwinata, Op.cit., hal 162

tersebut ter apresiasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.⁴⁴

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi nilai mata uang adalah kebijakan pertukaran mata uang asing. Pertukaran mata uang asing ini dapat ditentukan apakah menggunakan *floating exchange rate* atau *fixed rate*. *Floating exchange rate* ini adalah keadaan di mana nilai mata uang dibiarkan mengambang dan ditentukan oleh hukum pasar, sedangkan *fixed rate* adalah keadaan di mana nilai mata uang ditentukan dalam nominal tertentu.⁴⁵

Fluktuasi di dalam nilai mata uang tertentu mempengaruhi kondisi ekonomi domestik dan investasi internasional. Oleh sebab itu, muncul kebijakan *Foreign Exchange Market*, di mana suatu negara dapat melakukan perdagangan atas nilai mata uang nasional dan menentukan harga mata uang relatif. Terdapat beberapa situasi di dalam perdagangan nilai mata uang ini: yang pertama adalah *spot market* di mana perdagangan nilai mata uang dapat langsung dilakukan ketika pembeli dan penjual menyetujui adanya perdagangan nilai mata uang; yang kedua adalah *forward market* di mana perdagangan nilai mata uang dilaksanakan untuk kemudian hari digunakan; yang ketiga adalah *currency futures and options market* di mana perjanjian ini sering dilakukan oleh individu

⁴⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, Op.Cit., hal 173

⁴⁵ Ibid.

atau pelaku bisnis untuk memproteksi bisnis mereka dari kerugian akibat adanya fluktuasi nilai mata uang.⁴⁶

Currency swap adalah pertukaran valuta asing sebagai mata uang acuan yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. *Currency swap* biasanya dilakukan untuk menghindari adanya resiko atau kerugian dari perdagangan atau kegiatan ekonomi internasional.⁴⁷ Semenjak tahun 2007, bank sentral mulai menginisiasi untuk melakukan *swap* baik secara bilateral maupun multilateral. *Currency swap* ini diharapkan mampu melindungi bank sentral atau kegiatan ekonomi internasional seperti perdagangan internasional dari resiko fluktuasi nilai mata uang.

Currency swap termasuk dalam teori *hedging*. *Hedging* adalah teori mengenai exposure dari suatu nilai terhadap suatu nilai mata uang asing. *Hedging* biasanya dilakukan untuk meminimalkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat adanya fluktuasi nilai mata uang asing. *Hedging* memiliki dua tipe yakni jangka pendek dan jangka panjang. *Hedging* jangka pendek (*hedging future*) biasanya dilakukan antara dua belah pihak yang jatuh tempo nya telah diatur di kemudian hari, sedangkan *hedging* jangka panjang (*hedging future*)

⁴⁶Peter R.Rose, Op.Cit., hal 724-725

⁴⁷ Satyajit Das, *Swap and Financial Derivatives: The Global Reference to Products, Pricing, Applications, and Markets*, (Probus Publishing Company, 1994), hal 703

adalah pertukaran valuta asing yang dibayar di kemudian hari dengan *rate* yang sudah ditentukan sebelumnya.

Mekanisme *currency swap* sendiri terjadi apabila Bank Sentral negara A meminjamkan mata uang domestik untuk mendapat mata uang asing dari Bank Sentral negara B. Jumlah mata uang yang ditetapkan dalam *currency swap* ini tergantung pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. *Currency swap* ini juga dilakukan dengan *exchange rate* pada saat itu. *Exchange rate* adalah nilai mata uang tertentu terhadap nilai mata uang asing dalam periode tertentu.⁴⁸

Mata uang Jepang yakni *yen* adalah salah satu mata uang yang paling sering mendapatkan permintaan *swap*. *Swap* terhadap *yen* pertama kali dilakukan pada tahun 1980-an, ketika investor meminta untuk melakukan *back-to-back transaction* yang berkaitan dengan investasi dan peminjaman perusahaan. Faktor dari tingginya permintaan *swap* terhadap *yen* disebabkan oleh struktur perbankan Jepang dan permintaan *access liability management* dari korporasi-korporasi Jepang. *Access liability management* adalah neraca perdagangan antara aktiva dan pasiva dalam struktur perbankan.⁴⁹

⁴⁸ Steil, Ben, Dinah Walker, The Spread of Central Bank Currency Swap Since the Financial Crisis, *Council on Foreign Relations*, diakses pada 7 Maret 2016 http://www.cfr.org/international-finance/central-bank-currency-swaps-since-financial-crisis/p36419#!/?cid=from_interactives_listing

⁴⁹ Satyajit Das, *Op.Cit*, hal 743

Jepang dan Korea Selatan juga melakukan *bilateral swap* terhadap *yen* (mata uang Jepang) dan *won* (Korea Selatan). Hal ini terjadi melihat meningkatnya investasi luar negeri dan membuat para investor melakukan perjanjian *currency swap* untuk menghindari risiko valuta asing. Risiko valuta asing di sini berarti kerugian yang didapat perusahaan akibat adanya selisih rugi terhadap depresiasi suatu nilai mata uang asing. Selain itu, perjanjian *currency swap* bisa terjadi karena pihak yang melakukan perjanjian memiliki kebutuhan untuk meminjam mata uang asing agar tidak mengalami *currency loss* ketika mata uang domestik mengalami devaluasi.⁵⁰

Chiang Mai Initiatives adalah salah satu perjanjian ekonomi dalam hal keuangan yang dibuat oleh ASEAN+3 di antaranya adalah negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang. Agenda di dalam *Chiang Mai Initiatives* adalah *currency swap* atau pertukaran valuta asing yang dianggap mampu menciptakan stabilitas ekonomi di kawasan Asia.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ The Chiang Mai Initiatives, Institute for International Economics,

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang memiliki tujuan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah untuk menghasilkan data yang deskriptif. Objek dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini dibahas secara deskriptif sehingga metode penelitian kualitatif dianggap paling sesuai untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi.⁵²

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang digunakan sebagai penelitian, Penulis menggunakan teknik studi literatur dari buku, jurnal, dokumen, dan artikel-artikel dari internet. Sebelum dianalisis, seluruh data yang digunakan diseleksi, diolah dan dikomparasikan agar sesuai dengan penelitian Penulis.⁵³

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 9

⁵³ Ibid.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada **Bab I**, Penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah yang meliputi deskripsi masalah dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Pada **Bab II**, Penulis akan membahas mengenai Chiang Mai Initiatives sebagai landasan bagi negara-negara di ASEAN+3 untuk melakukan perjanjian *currency swap*.

Pada **Bab III**, Penulis akan membahas mengenai pemutusan perjanjian *currency swap* yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan yang disebabkan oleh peningkatan tensi politik terkait dengan sengketa Pulau Takeshima/Dokdo.

Pada **Bab IV**, Penulis akan membahas dan melakukan analisis mengenai dampak ekonomi terkait dengan pemutusan *currency swap* antara Jepang dan Korea Selatan dan melihat perubahan ekonomi secara luas dan relasi ekonomi di antara kedua negara tersebut.

Pada **Bab V**, Penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini.